

# PENDAMPINGAN MANAJEMEN RISIKO SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KOTA XYZ

Rizal Risnanda Utama<sup>1\*</sup>, Tony  
Dwi Susanto<sup>2</sup>, Reny Nadlifatin<sup>3</sup>,  
Apol Pribadi Subriadi<sup>4</sup>, Sholih<sup>5</sup>,  
Feby Artwodini Muqtadiroh<sup>6</sup>,  
Achmad Holil Noor Ali<sup>7</sup>

1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) Departemen Sistem  
Informasi, Institut Teknologi Sepuluh  
Nopember

## Article history

Received : 5 Januari 2024

Revised : 3 Maret 2024

Accepted : 20 Mei 2024

## \*Corresponding author

Rizal Risnanda Utama

Email : rizal.rh@its.ac.id

## Abstrak

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan peraturan No. 5 Tahun 2020 tentang pedoman manajemen risiko sistem pemerintahan berbasis elektronik. Peraturan tersebut harus diimplementasikan oleh seluruh pemerintah daerah beserta seluruh OPD yang ada didalamnya. Namun, hingga saat ini masih terdapat kendala dalam mengikuti pedoman peraturan tersebut karena keterbatasan OPD dalam memahami. Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan dalam implementasi Manajemen Risiko terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota XYZ. Fokus kegiatan ini adalah meningkatkan partisipasi dan pemahaman OPD terkait risiko yang mungkin timbul selama proses implementasi SPBE. Metode pendampingan yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini yaitu dengan melalui workshop terkait manajemen risiko SPBE dan dilanjutkan dengan meninjau pengisian form manajemen risiko SPBE yang telah dilakukan. Hasil kegiatan menunjukkan kemajuan positif dengan sebagian besar OPD aktif mengisi formulir manajemen risiko. Namun, temuan juga mengidentifikasi beberapa OPD yang masih memerlukan pemahaman lebih mendalam terkait konsep manajemen risiko karena pengisian yang dilakukan belum lengkap untuk seluruh formulir manajemen risiko SPBE. Oleh karena itu, saran yang diajukan melibatkan penguatan pendidikan dan pelatihan khusus, penyusunan materi penyuluhan yang disesuaikan, peningkatan komunikasi, dan pemantauan berkelanjutan. Dengan saran tersebut, diharapkan program pendampingan ini dapat mendukung efektivitas manajemen risiko SPBE di Pemerintah Kota XYZ, menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan transparan.

Kata Kunci: Manajemen Risiko; Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;  
Pendampingan; Workshop

## Abstract

The Ministry of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform has issued regulation number 5 of 2020 concerning guidelines for risk management for e-government. All regional governments and all OPDs within them must implement this regulation. However, until now there are still obstacles in following these regulatory guidelines due to OPD's limitations in understanding. This community service program aims to assist in implementing Risk Management related to E-Government in the XYZ City Government. This activity aims to increase OPD participation and understanding regarding risks that may arise during the SPBE implementation process. The mentoring method used in this community service is through workshops related to risk management E-Government followed by reviewing the filling in of the SPBE risk management form that has been carried out. The results of activities show positive progress with most OPDs actively filling out risk management forms. However, the findings also identified several OPDs that still required a deeper understanding of the concept of risk management because the filling-in was incomplete for all SPBE risk management forms. Therefore, the proposed suggestions involve strengthening special education and training, preparing tailored outreach materials, improving communication, and ongoing mentoring. With these suggestions, it is hoped that this mentoring program can support the effectiveness of risk management E-Government in the XYZ City Government, towards better and more transparent governance.

Keywords: Risk Management; E-Government; Mentoring; Workshop

Copyright © 2024 Rizal Risnanda Utama, Tony Dwi Susanto, Reny Nadlifatin,  
Apol Pribadi Subriadi, Sholih, Feby Artwodini Muqtadiroh,  
Achmad Holil Noor Ali.

## PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat dalam berinteraksi sesama manusia telah diubah oleh adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (Mukhsin, 2020). Masyarakat mengalami perubahan menjadi masyarakat yang memiliki pengetahuan lebih berkat kemudahan dalam mengakses informasi, baik yang bersumber dari lingkungan lokal maupun global (Suryadi, 2019). Perkembangan TI juga mempengaruhi proses tata kelola (Rumere et al., 2020). Pemerintah berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mengotomatisasi sistem dan selalu berusaha berinovasi untuk memberikan pelayanan dan mekanisme pelayanan yang lebih baik (Viscusi et al., 2010). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan upaya pemerintahan untuk meningkatkan transparansi keuangan dan peningkatan efektifitas dan efisiensi dengan pemanfaatan teknologi informasi. E-Government merupakan suatu metode yang digunakan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional pemerintahan dan memudahkan masyarakat memperoleh informasi terkait pemerintahan (Arief & Abbas, 2021). SPBE menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan transparan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, SPBE berusaha memberikan pelayanan yang lebih cepat, responsif, dan terjangkau kepada masyarakat (Muliawaty & Hendryawan, 2020). Melalui penerapan sistem ini, pemerintah dapat mengoptimalkan proses administratif, meningkatkan akuntabilitas, dan memperkuat partisipasi warga dalam pengambilan keputusan (Awaludin, 2019). Namun, bagi sebuah organisasi yang menerapkan teknologi informasi, dapat memunculkan risiko-risiko baru yang dapat berdampak pada proses bisnis pada organisasi tersebut (Al-Fajri et al., 2020).

Penerapan SPBE membawa sejumlah manfaat signifikan, antara lain peningkatan efisiensi administrasi dengan pengurangan birokrasi, penghematan biaya operasional, dan peningkatan kualitas layanan publik. Selain itu, SPBE memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan (Cholik, 2021). Meskipun penuh dengan potensi positif, implementasi SPBE tidak lepas dari sejumlah tantangan. Keamanan informasi, keterbatasan akses masyarakat terhadap teknologi, dan perubahan budaya di instansi pemerintah menjadi beberapa hambatan yang perlu diatasi (Damanik, 2019). Penerapan SPBE oleh pemerintah daerah merupakan sebuah upaya dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel (Rusdy & Flambonita, 2023).

Pengalaman global dan nasional memberikan gambaran nyata tentang berbagai strategi dan keberhasilan dalam menerapkan SPBE. Berbagai negara telah memperlihatkan inovasi dan langkah-langkah sukses dalam meningkatkan layanan publik dan efisiensi pemerintahan melalui SPBE (Pertiwi et al., 2021). SPBE mewakili evolusi fundamental dalam cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat. Dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan transparan, SPBE menjadi landasan untuk terwujudnya layanan publik yang lebih baik dan terintegrasi. Sementara tantangan masih ada, pengalaman dan manfaat global dan nasional dapat menjadi panduan berharga dalam mengimplementasikan SPBE secara holistik dan berkelanjutan (Warman et al., 2022).

Kota XYZ merupakan sebuah kota besar di pulau Jawa. Penerapan SPBE di Pemerintah Kota XYZ dapat menjadi acuan atau contoh untuk pemerintah kota atau kabupaten lain di provinsi tersebut. Pengenalan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Kota XYZ mencerminkan komitmen yang kuat terhadap inovasi dan kemajuan dalam tata kelola pemerintahan. Dukungan hukum dari Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 membawa harapan akan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif, serta pelayanan publik yang terkuakifikasi dan dapat diandalkan. Walaupun tujuan ini sangat ambisius dan berpotensi memberikan keuntungan yang signifikan, perlu diakui bahwa transformasi ini juga membawa sejumlah risiko yang perlu dikelola dengan cermat, seperti risiko keamanan informasi dan tantangan manajemen risiko yang melekat pada adopsi teknologi tinggi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE disebutkan bahwa peraturan tersebut bermaksud untuk mengelola berbagai risiko yang muncul khususnya risiko negatif dalam penerapan SPBE yang dapat menghambat pencapaian tujuan SPBE. Peraturan tersebut ditujukan untuk memberi pedoman bagi Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dengan adanya pedoman tersebut, diharapkan seluruh risiko dalam penerapan SPBE yang dialami oleh seluruh instansi dapat dikelola dengan baik sehingga dapat meningkatkan keberhasilan penerapan SPBE. Manajemen risiko SPBE memiliki proses yang dimulai dari kebijakan hingga pencatatan dan pelaporan (Aprianto et al., 2021) yang memiliki prinsip utama untuk perlindungan dan meningkatkan nilai tambah dari pemerintah daerah (Bisma, 2022).

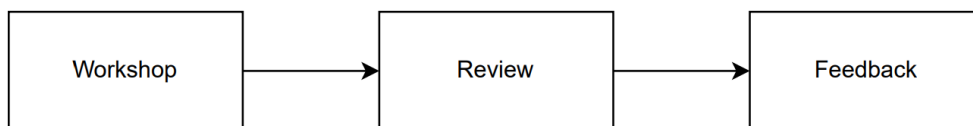
Dalam rangka merespon dinamika kompleks ini, program pengabdian kepada masyarakat (Abmas) ini memfokuskan pendampingannya pada aspek kritis, yakni manajemen risiko, yang mencakup identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko keamanan, operasional, dan privasi yang mungkin muncul sepanjang implementasi SPBE. Pendekatan ini diambil dengan mempertimbangkan perubahan paradigma pemerintahan melalui penerapan teknologi informasi, serta tantangan yang mungkin timbul di tengah perjalanan menuju birokrasi yang terpadu dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), seperti yang tergambar dalam visi dan misi SPBE, memberikan peluang besar untuk mencapai tujuan ambisius ini. Namun, kesuksesan penerapan SPBE tidak hanya terletak pada teknologi itu sendiri, melainkan pada kemampuan pemerintah untuk memahami dan mengelola risiko yang terkait dengan perubahan ini. Dengan pendampingan manajemen risiko, program Abmas ini bertujuan memberikan dukungan holistik kepada Pemerintah Kota XYZ agar dapat menghadapi tantangan ini dengan pemahaman yang mendalam, meminimalkan potensi dampak negatif, dan memaksimalkan potensi positif dari penerapan SPBE.

Program Abmas ini diarahkan untuk memperkaya kapasitas Pemerintah Kota XYZ dalam menghadapi kompleksitas yang melekat dalam penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan yang sejalan dengan visi SPBE untuk mewujudkan birokrasi yang terpadu dan pelayanan publik yang berkualitas khususnya dalam hal pengelolaan manajemen risiko SPBE.

## METODE PELAKSANAAN

Metode kegiatan dalam rangka pendampingan manajemen risiko Pemerintah Kota XYZ menggabungkan pendekatan workshop dan review hasil pengisian form manajemen risiko. Pendekatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam kepada para pemangku kepentingan terkait dengan risiko yang mungkin timbul selama implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Metode pelaksanaan yang digunakan disajikan pada Gambar 1.



**Gambar 1. Metode Pelaksanaan**

Detail dari alur metode yang digunakan pada Gambar 1 dijelaskan sebagai berikut.

### 1. Workshop

Workshop menjadi forum interaktif yang dipandu oleh pemateri dosen ITS dan merupakan pakar yang memiliki banyak pengalaman di bidang teknologi informasi dan manajemen risiko, membawa wawasan yang berharga terkait dengan implementasi SPBE. Pemateri juga didampingi oleh tim dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), yang terdiri dosen dan mahasiswa. Workshop ini melibatkan peserta dari Pemerintah Kota XYZ dan jajaran perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki peran kunci dalam pelaksanaan SPBE dalam OPD masing-masing. Peserta workshop terdiri dari para pemangku

kepentingan di lingkungan Pemerintah Kota XYZ, memastikan bahwa pandangan dari berbagai lapisan organisasi dapat terakomodasi. Materi workshop, yang mencakup identifikasi risiko potensial, evaluasi dampak, dan perumusan strategi pengelolaan risiko, akan diarahkan untuk memberikan solusi konkret yang sesuai dengan konteks Pemerintah Kota XYZ.



**Gambar 2. Workshop Manajemen Risiko SPBE Pemerintah Kota XYZ**

Tujuan utama dari workshop adalah membangun pemahaman bersama dan mendalam tentang dinamika risiko SPBE, serta merumuskan langkah-langkah konkret yang dapat diimplementasikan oleh Pemerintah Kota XYZ dan OPD terkait. Atau dengan kata lain, workshop yang dilakukan bertujuan untuk membangun pemahaman bersama terkait dengan pengisian formulir manajemen risiko SPBE untuk setiap OPD dalam Pemerintah Kota XYZ. Workshop ini dilakukan secara daring menggunakan media Zoom seperti yang diabadikan pada Gambar 2. Diadakannya workshop secara online atau daring membawa sejumlah poin-poin penting yang dapat memberikan nilai tambah dalam pelaksanaan program pendampingan manajemen risiko untuk Pemerintah Kota XYZ dan OPD terkait:

- **Aksesibilitas**  
Workshop daring memungkinkan partisipasi dari pemangku kepentingan yang tersebar geografis tanpa batasan jarak. Hal ini memfasilitasi keterlibatan penuh dari berbagai pihak, termasuk OPD yang mungkin berlokasi di wilayah yang berjauhan.
- **Fleksibilitas Waktu**  
Dengan format daring, peserta dapat mengakses workshop sesuai dengan jadwal yang sesuai dengan kesibukan mereka, meminimalkan dampak pada produktivitas sehari-hari.
- **Efisiensi Biaya**  
Mengurangi biaya perjalanan dan akomodasi yang mungkin timbul dalam workshop offline, yang dapat digunakan untuk meningkatkan aspek-aspek lain dari program pendampingan.
- **Inklusivitas**  
Workshop secara daring dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif untuk peserta dengan berbagai keterbatasan fisik atau mobilitas, memberikan akses yang lebih adil kepada informasi dan interaksi.  
Dengan mempertimbangkan poin-poin di atas, workshop daring menjadi alternatif yang efektif untuk memberdayakan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pendampingan manajemen risiko SPBE.

## 2. Review Hasil Pengisian Form Manajemen Risiko

Setelah melaksanakan workshop, kegiatan berikutnya adalah review secara mendalam terhadap hasil pengisian formulir manajemen risiko SPBE yang telah diisi oleh tim internal Pemerintah Kota XYZ. Formulir ini akan dirancang sesuai dengan format yang ada di PermenPANRB No. 5 tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE untuk menggali informasi terkait identifikasi risiko, tingkat keparahan, dan strategi pengelolannya. Sesuai dengan PermenPANRB tersebut, terdapat 5 formulir yang harus diisi oleh setiap

OPD. Untuk mempermudah, formulir tersebut disatukan menjadi 1 File Excel yang akan diunggah oleh masing-masing OPD kedalam sebuah tautan *google drive*. Review hasil pengisian form akan dilakukan oleh tim dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang terlibat dalam kegiatan pendampingan, sehingga dapat memberikan masukan konstruktif dan rekomendasi untuk perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan.

### 3. Sosialisasi Hasil dan Tindak Lanjut

Setelah workshop dan review, kegiatan terakhir yang dilakukan adalah sesi sosialisasi hasil yang melibatkan para pemangku kepentingan. Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan pemahaman yang menyeluruh tentang hasil identifikasi risiko dan rencana pengelolannya. Selanjutnya, akan disusun rencana tindak lanjut yang melibatkan pihak terkait untuk mengimplementasikan strategi pengelolaan risiko yang telah disepakati.

Metode kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kolaboratif, mempromosikan partisipasi aktif, dan menghasilkan rencana manajemen risiko yang tanggap terhadap konteks dan kebutuhan Pemerintah Kota XYZ dalam menghadapi dinamika SPBE.

## HASIL PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara daring (*online*) karena koordinasi waktu pelaksanaan tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan secara luring (*offline*). Kegiatan tersebut kurang lebih berlangsung selama 3 jam dengan dihadiri oleh perwakilan setiap OPD yang ada di Pemerintah Kota XYZ. Dalam pengabdian ini, acara dimulai dengan melakukan *workshop* yang dipimpin oleh salah satu anggota dosen pada pengabdian ini. Materi yang disampaikan pada saat *workshop* antara lain yaitu, definisi manajemen risiko, SPBE, manajemen risiko SPBE, pentingnya manajemen risiko SPBE selaras dengan peraturan yang berlaku, selera risiko, mitigasi risiko, formulir manajemen risiko SPBE dan lain sebagainya.

Setelah *workshop* selesai, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab serta *sharing* terkait pengisian formulir manajemen risiko SPBE yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota XYZ. Acara tanya jawab dan *sharing* ini bertujuan untuk menggali lebih lanjut kondisi pengisian formulir manajemen risiko SPBE yang sudah dilakukan. Dalam sesi ini, masih terdapat OPD yang merasa kebingungan dalam mengisi salah satu formulir. Sehingga perlu dibahas kembali penjelasan mengenai pengisian formulir yang harus dilakukan oleh masing-masing OPD. Setelah sesi tersebut, acara diakhiri dengan masing-masing OPD akan mengumpulkan formulir manajemen risiko SPBE yang telah diisi kedalam sebuah *link google drive* yang selanjutnya akan dianalisis dan direkap oleh tim pengabdian terkait progres pengisian masing-masing OPD.

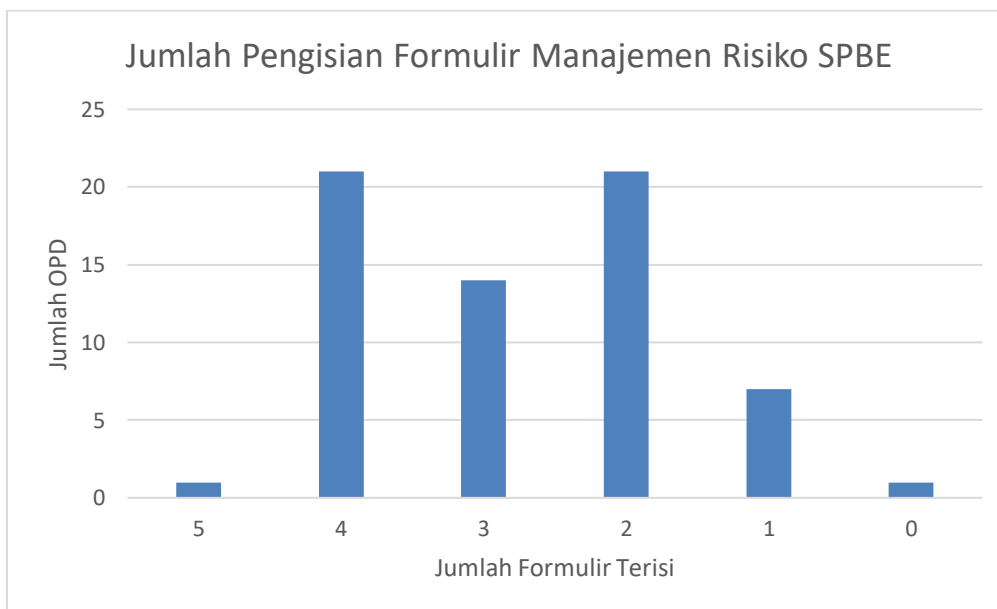
Setelah analisis dan rekap pengumpulan formulir manajemen risiko SPBE oleh masing-masing OPD, hasil yang dicapai menunjukkan kemajuan positif. Sebagian besar OPD di Kota XYZ telah aktif mengisi formulir manajemen risiko. Dari 65 OPD yang ada dibawah Pemerintah Kota XYZ, hanya 1 OPD yang belum mengumpulkan formulir manajemen risiko SPBE. Hal ini mencerminkan tingkat keterlibatan yang baik dalam upaya penerapan manajemen risiko sistem pemerintah secara elektronik (SPBE).

Contoh risiko yang berhasil diidentifikasi oleh sebuah OPD yaitu terkait kehilangan data. Risiko tersebut tergolong risiko negatif karena jika hal tersebut terjadi maka akan dapat menghambat sasaran SPBE dari sebuah OPD. Dalam formulir yang dikumpulkan, OPD tersebut juga menyebutkan bahwa akan ada strategi yang digunakan untuk mengantisipasi risiko tersebut. Kehilangan data dapat disebabkan oleh berbagai macam hal diantaranya yaitu kegagalan sistem, serangan siber dan kesalahan manusia. Kehilangan data dapat diantisipasi dengan cara membuat kebijakan terkait keamanan informasi yang mencakup enkripsi data, *backup* data secara berkala, dan melakukan pelatihan kepada staf yang berinteraksi dengan data tersebut.

Beberapa OPD belum melengkapi formulir manajemen risiko seperti yang ditampilkan pada Gambar 3. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa hanya ada 1 OPD yang telah mengisi secara penuh untuk 5 formulir manajemen risiko SPBE. Untuk OPD yang lain terdapat masih terdapat formulir yang kosong (belum diisi),

kurang pengisian, ataupun salah dalam melakukan pengisian formulir tersebut. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa pemahaman manajemen risiko SPBE masih perlu ditingkatkan di beberapa OPD. Dalam pembahasan ini, pendekatan yang saling melengkapi perlu diterapkan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang manfaat dan urgensi manajemen risiko dalam konteks SPBE.

Analisis lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan hambatan atau hambatan dalam pengisian formulir manajemen risiko. Faktor-faktor tersebut mungkin terkait dengan kurangnya pemahaman, keterbatasan sumber daya, atau aspek lain yang mempengaruhi partisipasi OPD dalam proses manajemen risiko. Keberhasilan pengisian formulir manajemen risiko oleh beberapa OPD merupakan langkah positif menuju penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan dan efektif.



**Gambar 3. Rekapitulasi Jumlah Pengisian Formulir Manajemen Risiko SPBE**

Namun, tantangan yang dihadapi oleh beberapa OPD juga menyoroti perlunya pendekatan strategis yang lebih spesifik dan saling melengkapi untuk memastikan partisipasi penuh seluruh OPD. Komunikasi dan kerjasama yang terbuka antara penyelenggara kegiatan pelayanan, Pemerintah Kota XYZ dan OPD harus lebih didorong.

Dengan menganalisis hasil yang diperoleh, maka dapat dirumuskan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas program pendampingan ini dalam mendukung implementasi SPBE dan manajemen risiko di tingkat OPD kota metropolitan XYZ.

## **KESIMPULAN**

Melalui kegiatan pengabdian ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat progres positif dalam implementasi manajemen risiko terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota XYZ. Sebagian besar OPD telah aktif mengisi formulir manajemen risiko. Secara rata-rata setiap OPD telah mengisi sebanyak 3 dari 5 formulir manajemen risiko SPBE. Hal tersebut menunjukkan tingkat partisipasi yang baik dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan. Secara rata-rata setiap OPD telah mengisi sebanyak 3 dari 5 formulir manajemen risiko SPBE.

Meskipun demikian, temuan juga menunjukkan adanya beberapa OPD yang belum sepenuhnya terlibat dalam proses manajemen risiko, kemungkinan karena pemahaman yang masih perlu ditingkatkan. Oleh

karena itu, perlu dilakukan pendekatan lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terkait manfaat pengelolaan risiko, serta untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi oleh OPD.

Berdasarkan hasil dan temuan kegiatan pengabdian ini, beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas program pendampingan manajemen risiko SPBE. Yang pertama yaitu terkait penguatan pendidikan dan pelatihan. Terdapat staff perwakilan yang bertugas mengisi formulir manajemen risiko SPBE pada OPD-nya yang masih mengalami kebingungan. Untuk itu, disarankan untuk diadakan pelatihan yang secara berkala baik secara khusus OPD maupun komunal pada Pemerintah Kota guna meningkatkan pemahaman OPD terkait manfaat dan implementasi manajemen risiko SPBE.

Selanjutnya, dapat juga dilakukan pengembangan modul pelatihan daring. Hal ini diharapkan ketika pengisian formulir serta implementasi manajemen risiko dapat mengacu pada modul tersebut. Pemerintah Kota maupun OPD dapat bekerja sama dengan mitra yang dapat mengembangkan modul untuk manajemen risiko SPBE. Dengan demikian, OPD diharapkan dapat melakukan pengecekan pada modul secara mandiri dan berkala agar implementasi SPBE dapat berjalan dengan baik.

Saran yang terakhir yaitu, Pemerintah Kota XYZ dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan seluruh OPD untuk memastikan pemahaman yang komprehensif tentang manfaat dan langkah-langkah implementasi manajemen risiko. Secara tidak langsung, kegiatan ini dapat menjadi pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan terkait manajemen risiko SPBE di masing-masing OPD. Selain itu, kegiatan ini dapat dijalankan juga ketika manajemen risiko SPBE telah diimplementasi. Ketika telah diimplementasi, komunikasi dan koordinasi dapat membantu dalam mengelola dampak risiko serta menyesuaikan strategi yang diperlukan untuk menangani risiko SPBE tersebut. Dengan adanya beberapa saran yang telah disebutkan, diharapkan program pendampingan manajemen risiko SPBE dapat terus memberikan kontribusi positif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan penerapan SPBE di Pemerintah Kota XYZ.

Seperti yang dilansir pada halaman laman resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Keputusan Menteri No 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023 bahwa KemenPANRB telah mengumumkan hasil evaluasi SPBE tahun 2023. Proses evaluasi oleh KemenPANRB juga banyak melibatkan perguruan tinggi. Hasil evaluasi indeks SPBE nasional memperoleh kategori cukup dengan skala 2,34 dari 5 yang dapat dikatakan telah melampaui target tahunan. Hal tersebut dapat digunakan sebagai pemantik bagi instansi pusat maupun daerah khususnya Pemerintah Kota XYZ dalam mengimplementasikan SPBE.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih diucapkan kepada Departemen Sistem Informasi Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas Institut Teknologi Sepuluh Nopember sesuai dengan Perjanjian Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Tematik Dana Departemen Batch 2 Tahun 2023 dengan Perjanjian / Kontrak Turunan Nomor 2591/PKS/ITS/2023. Terima kasih turut diucapkan kepada Pemerintah Kota XYZ yang telah berkenan menjadi objek pengabdian masyarakat untuk pendampingan manajemen risiko SPBE.

## PUSTAKA

- Al-Fajri, B. H., Fauzi, R., & Mulyana, R. (2020). Perancangan Manajemen Risiko Operasional SPBE/E-Gov Pada Kategori Risiko Infrastruktur, Aplikasi, Layanan, Data dan Informasi Berdasarkan Permen PANRB Nomor 5 Tahun 2020 (Studi Kasus: Pemerintah Kota Bandung). *E-Proceeding of Engineering*, 7364.
- Aprianto, K., Endroyono, E., & Nugroho, S. M. S. (2021). Analisis Manajemen Risiko SPBE Menggunakan COBIT 5 For Risk dan ISO 31000:2018 di Kabupaten Magetan. *Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komunikasi)*, 23(2), 107–123. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33169/iptekkom.23.2.2021.107-123>

- Arief, A., & Abbas, M. Y. (2021). Kajian Literatur (Systematic Literature Review): Kendala Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). *PROtek: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro*, 8(1), 1–6. <https://doi.org/10.33387/protk.v8i1.1978>
- Awaludin, L. (2019). Strategi Penguatan Kompetensi Sdm Teknologi Informasi&Komunikasi (Tik) Dalam Mengoptimalkan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe). *Paradigma POLISTAAT Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(2), 118–134. <https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v2i2.2115>
- Bisma, R. (2022). Risiko Aset Teknologi Informasi: Studi kasus Implementasi Manajemen Risiko SPBE Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Balikpapan. *Journal of Information Engineering and Educational Technology*, 6(2), 73–79. <https://doi.org/10.26740/jieet.v6n2.p73-79>
- Cholik, C. A. (2021). Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi / ICT dalam Berbagai Bidang. *Jurnal Fakultas Teknik*, 2(2), 39–46.
- Damanik, M. P. (2019). Sumsel Smart Province: Implementasi Dan Tantangan Kesiapan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 23(2), 195–212. <https://doi.org/10.31445/jskm.2019.2719>
- Mukhsin, M. (2020). Peranan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Menerapkan Sistem Informasi Desa Dalam Publikasi Informasi Desa Di Era Globalisasi. *Teknokom*, 3(1), 7–15. <https://doi.org/10.31943/teknokom.v3i1.43>
- Muliawaty, L., & Hendryawan, S. (2020). Peranan E-Government Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang). *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(2), 101–112. <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/kebijakan.v11i2.2898>
- Pertiwi, A., Dema, H., Mustanir, A., & Anugrah, E. (2021). Penerapan E-Government dalam Mewujudkan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan Desa (Studi pada Pemerintahan Desa Bulu Timoreng). *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 9(3), 130–139. <https://doi.org/10.55678/prj.v9i3.508>
- Rumere, H. M., Tanaamah, A. R., & Sitokdana, M. N. N. (2020). Analisis Kinerja Tata Kelola Teknologi Informasi Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Kota Salatiga Menggunakan Framework Cobit 5.0. *Jurnal Bina Komputer*, 2(2), 1–14.
- Rusdy, imam R., & Flambonita, S. (2023). Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Good Governance. *LexLata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 05(02), 218–239. <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i2.2351>
- Suryadi, S. (2019). Peranan Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Kegiatan Pembelajaran Dan Perkembangan Dunia Pendidikan. *Jurnal Informatika*, 3(3), 9–19. <https://doi.org/10.36987/informatika.v3i3.219>
- Viscusi, G., Batini, C., & Mecella, M. (2010). *Information Systems for eGovernment* (1st ed.). Springer Berlin, Heidelberg. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-642-13571-2>
- Warman, N. S., Syamsir, Maldini, M., Nurhasanah, O., Oktariandani, N. R., & Syafikruzi, I. H. (2022). Implementasi Inovasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Pekanbaru. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya (Mateandrau)*, 1(2), 132–148. <https://doi.org/10.55606/mateandrau.v1i2.161>



**Format Sitasi:** Utama, R.R., Susanto, T.D., Nadlifatin, R., Subriadi, A.P., Sholiq, Muqtadiroh, F.A., Ali, A.H.N. (2024). Pendampingan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota XYZ. *Reswara. J. Pengabdian. Kpd. Masy.* 5(2): 460-468. DOI: <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v5i2.4181>



Reswara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat oleh Universitas Dharmawangsa Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan dengan Lisensi Internasional Creative Commons Attribution NonCommercial ShareAlike 4.0 ([CC-BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/))